



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan rahmad-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dapat diselesaikan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijadikan dasar bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Dokumen Rencana Kerja 1 (satu) tahun ke depan. Sehingga setiap OPD diharuskan mempunyai dasar pedoman berupa dokumen rencana kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023, namun demikian dokumen Renja Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang telah disusun ini merupakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang disusun telah selaras dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Harapan kami dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ini, dalam proses menuju ke pembahasan KUA-PPAS dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan penyusunan RKA, sehingga target sasaran dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan OPD dapat tercapai.

Malili, Mei 2022

Inspektur,

SALAM LATIEF, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19690403 198903 1 007



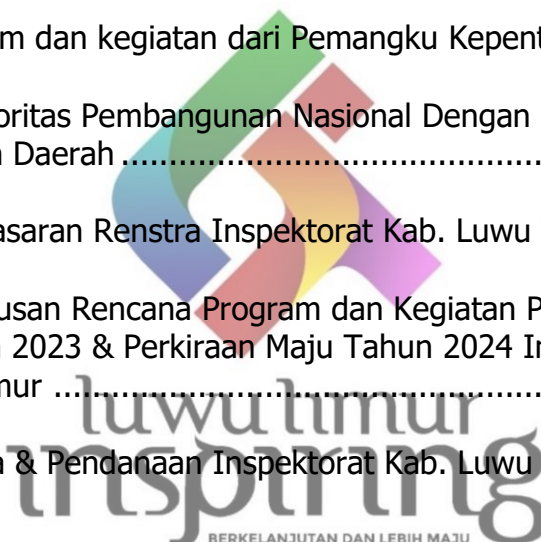
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Landasan Hukum	2
1. 3 Maksud dan Tujuan	5
1. 4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN LALU	7
2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	7
2. 2 Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	22
2. 3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	24
2. 4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2. 5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR	35
3. 1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	35
3. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	36
3. 3 Program dan Kegiatan	36
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	44
BAB V. PENUTUP	49



DAFTAR TABEL

Tabel 1	(T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Dengan Tahun 2022	8
Tabel 2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	22
Tabel 3	(T-C.30) Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	23
Tabel 4	(T-C.31) Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.....	26
Tabel 5	Usulan Program dan kegiatan dari Pemangku Kepentingan	34
Tabel 6	Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional Dengan Prioritas Pembangunan Daerah	35
Tabel 7	Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kab. Luwu Timur	36
Tabel 8	(T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 & Perkiraan Maju Tahun 2024 Inspektorat Kab. Luwu Timur	38
Tabel 9	Rencana Kerja & Pendanaan Inspektorat Kab. Luwu Timur	45





BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Rencana kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber pendanaannya.



1. 2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan RENJA Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010;
8. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah NO. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



10. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadilan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaga Negara republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional;



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019;
29. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Grand Desing Reformasi Birokrasi 2010-2025;
30. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



33. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat kabupaten Luwu Timur;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

1. 3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten LUwu Timur Tahun 2023 bertujuan agar terjalin sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah. Rencana kerja disusun sebagai pedoman bagi :

1. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
2. Penyusunan kebijakan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023.

1. 4 Sistematika Penulisan

RENJA Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang
1. 2 Dasar Hukum
1. 3 Maksud dan Tujuan
1. 4 Sistematika penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT PADA TAHUN LALU

2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur



- 2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
- 2. 3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

- 3. 1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
- 3. 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP





BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah ihtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur.

Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value For Money*. Penggunaan konsep tersebut menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumber daya yang digunakan, seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material dan masukan lainnya dalam melakukan suatu kegiatan.
- Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dalam pelaksanaan suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik.
- Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.



Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Hasil evaluasi atas pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 disajikan pada **Tabel Lampiran 1 (T-C.29)**.

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 (Tabel Lampiran 1 (T-C.29), beberapa hal yang menjadi catatan antara lain :

A. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan :

1. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi kepegawaian
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Dari 217 orang peserta yang direncanakan, terealisasi 198 orang

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah pada sub kegiatan :

1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dari target 13.000 lembar, terealisasi 9.409 Lembar
2. Fasilitas Kunjungan Tamu
Dari target 800 orang tamu terealisasi 774 orang
3. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Dari target 80 kali terealisasi 78 kali

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
Target kinerja 1.300 surat terealisasi 1.261 surat

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan :

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan



2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan :
 1. Reviu laporan kinerja
Target kinerja 3 kali dan terelisasi 2 kali
 2. Reviu laporan keuangan
Target kinerja 6 kali dan terealisasi 5 kali
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada sub kegiatan :
 1. Pengawasan dengan tujuan tertentu
Target kinerja 35 kali, terealisasi 31 kali
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - a. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi pada sub kegiatan :
 1. Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah
Target kinerja 55 kali dan terealisasi 51 kali
- B. Program/Kegiatan yang memenuhi/melebihi target :
 1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada Sub kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada Sub kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pada Sub kegiatan :
 1. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
 2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada Sub kegiatan :
 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;



2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
3. Penyediaan bahan logistik kantor;
4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada Sub kegiatan :
 1. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada Sub kegiatan :
 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, pada Sub kegiatan :
 1. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
 2. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, pada Sub kegiatan :
 1. Pengawasan kinerja pemerintah daerah;
 2. Pengawasan keuangan pemerintah daerah;
 3. Pengawasan Desa;
 4. Kerjasama Pengawasan internal;
 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - a. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, pada Sub kegiatan :
 1. Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi
 2. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi



2. 2 ANALISIS KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

Sesuai dengan dokumen Renstra Inspektorat Tahun 2021 – 2026 hubungan antara tujuan, sasaran serta indikator sebagai berikut :

Tabel 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan kualitas pengawasan daerah		Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Luwu Timur	Level	3	3	3	3	3
	Meningkatnya Indeks Maturitas SPIP	Capaian Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,3376	3,3380	3,3380	3,3381	3,3382

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Restra Inspektorat tertuang dalam capaian sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2 (T-C.30)

Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator	Standar Nasional	Target Renstra					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	
1	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Mekanisme penilaian maturitas SPIP mengalami Perubahan



Fokus penilaian Maturitas SPIP merupakan sub unsur SPIP yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015, unsur tersebut yaitu :

1. Unsur lingkungan pengendalian, terdiri atas 8 sub unsur;
2. Unsur penilaian resiko, terdiri atas 2 sub unsur;
3. Unsur pengendalian, terdiri atas 11 sub unsur;
4. Unsur informasi dan komunikasi, terdiri atas 2 sub unsur; dan
5. Unsur pemantauan, terdiri atas 2 sub unsur.

Ada lima strategi untuk peningkatan maturitas SPIP, yaitu :

1. Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis;
2. Pengkomunikasian kebijakan dan prosedur;
3. Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi;
4. Evaluasi formal, berkala dan terdokumentasi;
5. Pemantauan/pengembangan berkelanjutan.

Pada Tahun 2021 sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dimana penilaian Maturitas SPIP dimulai dari manajemen resiko sejak perencanaan dilaksanakan.

Pada penyusunan RPJMD Pemerintah Daerah dan Renstra OPD harus disusun mengenai manajemen resiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan dokumen perencanaan yang disusun.

2.3 ISU-ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

Dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintah telah membentuk lembaga pengawasan mulai pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Lembaga pengawasan yang dibentuk oleh pemerintah yang ada di daerah yaitu Inspektorat daerah bertujuan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menjelaskan bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemimpinan yang baik.

Selama ini keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas (APIP) dinilai dari semakin banyak temuan maka pengawasan dianggap semakin baik sehingga perannya seperti anjing pelacak (watchdog) atau entitas pemeriksaannya dan selaku watchdog aktivitasnya meliputi inspeksi, observasi, perhitungan, cek dan ricek yang bertujuan untuk memastikan ketaatan/kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Perubahan paradigm peran APIP dari watchdog menjadi konsultan diharapkan mampu memberikan pembinaan, pembimbingan dan saran terkait aktivitas organisasi dan lingkup penugasan dapat disepakati bersama untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan resiko, pengendalian dan proses tata kelola organisasi.

Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD/SKPD serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* salah satu perannya adalah melakukan reviu atas dokumen perancangan dan penganggaran daerah yakni reviu atas dokumen RKPD/perubahan RKPD, Rencana Kerja SKPD/Perubahan Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS/KUA-PPAS Perubahan, RKA-SKPD/RKA SKPD Perubahan dan RKA-PPKD/RKA-PPKD Perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.



Seiring dengan perubahan peran Inspektorat yang mengalami pergeseran dari perannya sebagai watchdog menjadi penjamin mutu dan menjadi konsultan, sebagai Pengawas intern Inspektorat diharapkan mampu melaksanakan perannya tersebut dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan SPIP.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di Tahun 2023 pasti akan penuh tantangan, antara lain :

1. Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Reviu terhadap refocusing dana penanganan covid-19)
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public (pengalokasian obat-obatan penanganan covid-19)
3. Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, dimana sesuai dengan program prioritas Kabupaten Luwu Timur 1 milyar untuk 1 desa.
4. Meningkatnya koordinasi dan konsultasi khususnya dengan APH dan auditan
5. Peningkatan SDA Pengawasan

Strategi pemecahan masalah dan isu-isu penting antara lain melalui :

1. Pelaksanaan pemeriksaan internal dan reviu;
2. Melaksanakan peningkatan koordinasi dengan APH;
3. Penerapan teknologi pengawasan dana desa melalui siswaskeudes;
4. Meningkatkan koordinasi dengan auditan melalui klinik konsultasi pengawasan.

2. 4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan untuk pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 disajikan pada **Tabel Lampiran 2 (T-C.31)**, dimana rancangan awal RKPD sebesar Rp. 11.631.068.421,00 dan setelah dilakukan reviu terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2023 maka rancangan Akhir berubah menjadi Rp. 11.919.351.311,00

Perubahan tersebut disebabkan karena adanya perubahan besaran belanja pada beberapa sub kegiatan, yaitu :



1. Pengawasan keuangan desa yang semula direncanakan untuk 44 desa berubah menjadi 124 dan dilaksanakan di tiap triwulan;
2. Terjadi penambahan anggota tim saber pungli dari pihak kepolisian pada sub kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal;
3. Penambahan anggaran untuk pelaksanaan tindak lanjut temuan atas pemeriksaan, dimana setiap temuan keuangan yang belum ditindaklanjuti selama $\pm$ 2 tahun, maka dilaporkan ke KPK;
4. Penambahan beberapa sub kegiatan baru yang diwajibkan didalam Maturitas SPIP dan reformasi birokrasi, diantaranya layanan konsultasi public, LHKPN, analisis resiko dan lain-lain

2. 5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

TIDAK ADA USULAN



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pada Tahun 2023 mendatang, isu produktivitas dan mitigasi *scarring effect* akibat pandemic Covid-19 masih menjadi tantangan untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mengusung tema **"Peningkatan produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

RKP Tahun 2023 juga disusun dalam rangka menuju Indonesia sebagai Negara maju, lepas dari *Middle Income Trap*, sesuai visi Indonesia 2045. Beberapa arah kebijakan prioritas pembangunan nasional pada tahun 2023 mencakup percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sumber daya manusia, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energy, percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi serta pembangunan ibu kota nusantara.

RKP Tahun 2023 turut menetapkan target dan sasaran indikator pembangunan, yakni :

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen;
2. Tingkat kemiskinan 7,5-8,5 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka 5,3-6,0 persen;
4. Rasio Gini 0,375-0,378;
5. Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49 persen
6. Penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen;
7. Nilai tukar petani 103-105;
8. Nilai tukar nelayan 106-107

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, konsumsi masyarakat akan didorong tumbuh 5,2-5,4 persen, seiring dengan



peningkatan aktivitas masyarakat dan sejalan dengan peralihan dari masa pandemic ke endemi. Peningkatan investasi juga didorong untuk tumbuh pada Tahun 2023 seiring dengan berkelanjutannya pembangunan infrastruktur prioritas, pelaksanaan industrialisasi dan peningkatan investasi pada industry ramah lingkungan. Ekspor didorong tumbuh 6,0-7,3 persen. Pertumbuhan ini akan berasal dari peningkatan permintaan global seiring dengan membaiknya kondisi global dan peningkatan produktivitas dalam negeri.

Terdapat 14 (empat belas) *major project* yang diidentifikasi memiliki peran signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan, yakni :

1. Kawasan industry prioritas dan *Smelter*;
2. Pengelolaan terpadu UMKM;
3. *Food estate*;
4. Destinasi pariwisata prioritas;
5. Akselerasi pembangunan energy terbarukan dan konversi energy;
6. Reformasi system perlindungan social;
7. Reformasi system kesehatan nasional;
8. Reformasi pendidikan keterampilan;
9. Percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*;
10. Wilayah adat papua (Laa Pago dan Domberay);
11. Pembangunan ibukota nusantara;
12. Jaringan pelabuhan utama terpadu;
13. Transformasi digital; dan
14. Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Tahun Ke – 3 untuk periode 2021 – 2026, yaitu :



Tabel 4

Tujuan dan Sasaran Renstra
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Kualitas pengawasan daerah	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Luwu Timur	Meningkatnya indeks Maturitas SPIP	Capaian Indeks Maturitas SPIP
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Inspektorat	Nilai SAKIP

Apa sebenarnya arti Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau biasa disingkat Maturitas SPIP ?. Secara sederhana istilah ini menunjukkan ukuran kualitas dari Sistem Pengendalian Intern pada suatu organisasi di Pemerintahan. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi tersebut. Untuk mencapai kualitas pengendalian intern yang baik, organisasi harus memenuhi parameter-parameter maturitas tertentu.

Kualitas Sistem Pengendalian Intern diukur melalui kemampuan Sistem Pengendalian Intern dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, yang dilihat melalui 2 (dua) hal, yaitu

- Aspek desain pengendalian intern (*control design*), aspek ini menyangkut ada tidaknya dan baik tidaknya rancangan pengendalian intern suatu organisasi;
- Aspek penerapannya (*control implementation*), terkait erat dengan efektif tidaknya pelaksanaan rancangan pengendalian yang ada.

Dengan demikian, organisasi yang maturitas sistem pengendaliannya baik akan memiliki rancangan pengendalian yang tepat dan melaksanakan rancangan itu secara efektif dalam seluruh aktivitasnya, sehingga pengendaliannya telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi.



Parameter pengukuran Maturitas Sistem Pengendalian Intern dapat diturunkan dari tiap-tiap unsur atau komponennya. Jika memakai kerangka kerja sistem pengendalian intern COSO 2013, ada 5 (lima) unsur yang perlu diturunkan parameternya yaitu :

- Lingkungan Pengendalian (*control environment*);
- Penilaian Resiko (*risk assessment*);
- Kegiatan Pengendalian (*Control activities*);
- Informasi dan komunikasi (*information and communication*);
- Kegiatan pemantauan (*monitoring activities*).

Berdasarkan Surat Dari Badan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bupati Luwu Timur Nomor S-776/PW21/3/2021 Tanggal 06 Desember 2021 Perihal Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dijelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Luwu Timur telah memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefenisi)** dengan nilai 3,1560. Rincian hasil penilaian pada Triwulan I Tahun 2022 pada tabel di bawah ini :

Tabel 5
Rincian Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I Tahun 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1	Penetapan Tujuan	40%	4,000
2	Struktur dan Proses	30%	2,838
3	Pencapaian Tujuan	30%	2,350
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP			3,1560
Nilai Manajemen Resiko Indeks			2,938
Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)			2,358



3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan terdiri dari belanja SKPD dan belanja urusan wajib/pilihan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukung. Indikator kinerja program dan kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya *misinterpretasi*, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek relevan, sehingga ditentukan indikator program/kegiatan seperti yang tertuang pada **Tabel Lampiran 3 (T-C.33)**.





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (Renstra) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun 2024 sebagai mana disajikan dalam **Tabel Lampiran 4**.



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Tahun 2023 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur.

Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur yang disesuaikan dengan pagu anggaran yang diterima Inspektorat.

Alokasi anggaran indikatif pada Tahun 2023 yang diperuntukkan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan pada Inspektorat sebesar Rp. 11.919.351.311,00. Sebagai input bagi para pemangku kebijakan dalam hal pengalokasian anggaran pemerintah daerah bahwa dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan daerah, masing-masing pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk Inspektorat sesuai surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700-462 Tahun 2007, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2900/SJ tanggal 23 September 2008, Surat Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/435/A.2/IJ tanggal 07 April 2017 dan surat Direktur Jendral Depdagri Nomor 700/503/A1/SJ tentang kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain itu alokasi anggaran penanganan covid-19 yang cukup besar memerlukan pengawasan agar terhindar dari penyelewengan.



Demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Kabupaten Luwu Timur mendapat alokasi anggaran untuk peningkatan pengawasan.

INSPEKTUR

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salam Latief'.

SALAM LATIEF, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19690403 198903 1 007



Tabel Lampiran 1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2022

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
	INSPEKTORAT DAERAH									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	2	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	200,00	2	1	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	10	3	

	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	45 Orang	50 Orang	44 Orang	44 Orang	100,00	43	43	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100,00	17	3	
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH									
	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Presentase kelengkapan data administrasi kepegawaian	95 Persen	0 Persen	100 Persen	50 Persen	50,00	100	0	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan tugas dan fungsi	53 Orang	2 Orang	40 Orang	40 Orang	100,00	53	37	
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	200 Orang	0 Orang	217 Orang	198 Orang	91,24	41	37	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 Orang	2 Orang	6 Orang	6 Orang	100,00	10	2	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH									
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 Unit	38 Unit	13 Unit	13 Unit	100,00	13	0	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Unit	0 Unit	13 Unit	13 Unit	100,00	2	0	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	16 Jenis	16 Jenis	16 Jenis	16 Jenis	100,00	16	16	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan	1300 Lembar	35.811 Lembar	13000 Lembar	9409 Lembar	72,38	13000	4000	

	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Exemplar	60 Exemplar	60 Exemplar	60 Exemplar	100,00	60	15	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	375 Orang	1608 Orang	800 Orang	774 Orang	96,75	375	24	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	73 Kali	25 Kali	80 Kali	78 Kali	97,50	73	17	
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	0	0	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1300 Laporan	1.045 Laporan	1300 Laporan	1261 Laporan	97,00	1300	240	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon dan air yang terbayarkan	24 Rekening	24 Rekening	24 Rekening	24 Rekening	100,00	24	6	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100,00	5	0	
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	8 Unit	32 Unit	21 Unit	65,63	8	3	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	44 Unit	53 Unit	44 Unit	44 Unit	100,00	44	4	

	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	1	1	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									
	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL									
	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Jumlah obrik pengawasan kinerja	39 OPD	39 OPD	39 OPD	39 OPD	100,00	39	39	
	Pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah obrik pengawasan keuangan	56 OPD	56 OPD	56 OPD	56 OPD	100,00	68	56	
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu laporan kinerja yang dilaksanakan	3 Kali	2 Kali	3 Kali	2 Kali	66,67	3	3	
	reviu Laporan keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan yang dilaksanakan	6 Kali	6 Kali	6 Kali	5 Kali	83,33	6	3	
	Pengawasan Desa	Jumlah pengawasan desa yang dilaksanakan	44 desa	44 desa	65 desa	65 desa	100,00	124	0	
	Kerjasama Pengawasan internal	Presentase obrik pengawasan yang tersangkut kasus korupsi	3 Persen	6,63 Persen	3 Persen	4,37 Persen	145,67	3	1,67	
	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP internal dan eksternal	88 Persen	81,27 Persen	88,00 Persen	79,82 Persen	90,70	88	74,84	
		Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	90 Persen	92,71 Persen	90,00 Persen	91,32 Persen	101,47	95	91,32	
	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU									
	Penyelenggaraan pengawasan kerugian negara/Daerah	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	12 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0,00	0	0	

	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	25 Kali	26 Kali	35 Kali	31 Kali	88,57	50	10	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI									
	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI									
	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Jumlah pendampingan dan sistensi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	42 Kali	15 Kali	55 Kali	51 Kali	92,73	39	0	
	pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	jumlah pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan	39 OPD	3 OPD	39 OPD	39 OPD	100,00	39	0	
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah obrik pencegahan dan pemberantasan korupsi	10 obrik	9 obrik	10 obrik	10 obrik	100,00	10	0	

TABEL LAMPIRAN 2 (T-C.31)
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					RANCANGAN AWAL RKPD					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.342.448.478	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.749.684.635	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				94.291.356	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				94.917.736	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Malili	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	29.554.070	Penyusunan Daerah Perencanaan Perangkat daerah	Malili	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	29.554.070	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Malili	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	12.981.195	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Malili	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	12.981.195	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Malili	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	5.373.620	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Malili	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	6.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Malili	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	46.382.471	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Malili	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	46.382.471	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				6.628.972.554	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				6.035.582.331	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Malili	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbavarkan	45 Orang	6.625.392.786	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbavarkan	45 Orang	6.023.769.931	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Malili	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	18 Dokumen	3.579.768	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	18 Dokumen	11.812.400	

	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				653.251.823		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				665.251.823	
	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Malili	Presentase kelengkapan data administrasi kepegawaian	95 Persen	6.821.694		Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian		Presentase kelengkapan data administrasi kepegawaian	95 Persen	6.821.694	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Malili	Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan tugas dan fungsi	53 Orang	508.611.059		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan tugas dan fungsi	53 Orang	520.611.059	
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Malili	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	200 Orang	32.819.070		Sosialisasi peraturan perundang-undangan		Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	200 Orang	32.819.070	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Malili	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 Orang	105.000.000		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 Orang	105.000.000	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				579.348.300		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				629.348.300	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Malili	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 Unit	1.348.900		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 Unit	1.348.900	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Malili	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Unit	21.806.500		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Unit	71.806.500	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Malili	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	16 Jenis	3.908.700		Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	16 Jenis	3.908.700	

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Malili	Jumlah barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan	1300 Lembar	10.000.000		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan	1300 Lembar	10.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Malili	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Exemplar	6.180.000		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Exemplar	6.180.000	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Malili	Jumlah tamu yang difasilitasi	375 Orang	14.875.000		Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi	375 Orang	14.875.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Prov/luar prov	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	73 Kali	521.229.200		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	73 Kali	521.229.200	
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				162.000.000		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				100.000.000	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Malili	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	162.000.000		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	100.000.000	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				134.084.445		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				134.084.445	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Malili	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1300 Laporan	8.379.645		Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1300 Laporan	8.379.645	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Malili	Jumlah rekening telepon dan air yang dibayarkan	24 Rekening	50.704.800		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah rekening telepon dan air yang dibayarkan	24 Rekening	50.704.800	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Malili	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan	5 Orang	75.000.000		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan	5 Orang	75.000.000	
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				90.500.000		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				90.500.000	

	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Malili	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	48.000.000		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	48.000.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Malili	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	44 Unit	32.500.000		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	44 Unit	32.500.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Malili	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	10.000.000		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				2.541.261.252		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				3.109.869.684	
	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL				2.171.261.252		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL				2.482.414.494	
	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Malili	Jumlah obrik pengawasan kinerja	39 OPD	220.000.000		Pengawasan kinerja pemerintah daerah		Jumlah obrik pengawasan kinerja	39 OPD	256.164.630	
	Pengawasan keuangan pemerintah daerah	Malili	Jumlah obrik pengawasan keuangan	56 OPD	921.132.069		Pengawasan keuangan pemerintah daerah		Jumlah obrik pengawasan keuangan	56 OPD	833.602.715	
	Reviu Laporan Kinerja	Malili	Jumlah reviu laporan kinerja yang dilaksanakan	3 Kali	34.888.150		Reviu Laporan Kinerja		Jumlah reviu laporan kinerja yang dilaksanakan	3 Kali	35.916.500	
	reviu Laporan keuangan	Malili	Jumlah reviu laporan keuangan yang dilaksanakan	6 Kali	74.719.233		reviu Laporan keuangan		Jumlah reviu laporan keuangan yang dilaksanakan	6 Kali	78.976.575	
	Pengawasan Desa	Desa	Jumlah pengawasan desa yang dilaksanakan	44 desa	263.077.800		Pengawasan Desa		Jumlah pengawasan desa yang dilaksanakan	124 desa	297.935.424	
	Kerjasama Pengawasan internal	Kab Luwu Timur	Presentase obrik pengawasan yang tersangkut kasus korupsi	3 Persen	477.444.000		Kerjasama Pengawasan internal		Presentase obrik pengawasan yang tersangkut kasus korupsi	3 Persen	630.990.000	

	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Kab Luwu Timur	Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP internal dan eksternal	88 Persen	180.000.000		Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP		Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP internal dan eksternal	88 Persen	348.828.650	
			Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	90 Persen					Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	90 Persen		
	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU				370.000.000		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU				627.455.190	
	Penyelenggaraan pengawasan kerugian negara/Daerah	Kab Luwu Timur	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	12 Kasus	150.000.000		Penyelenggaraan pengawasan kerugian negara/Daerah		Jumlah penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	12 Kasus	150.000.000	
	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Kab Luwu Timur	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	25 Kali	220.000.000		Pengawasan dengan tujuan tertentu		Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	45 Kali	477.455.190	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				747.358.691		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.059.796.992	
	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				747.358.691		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.059.796.992	
	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Malili	Jumlah pendampingan dan sistensi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	42 Kali	537.940.691		Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah		Jumlah pendampingan dan sistensi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	62 Kali	936.466.992	
	pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Malili	jumlah pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan	39 OPD	12.815.000		pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi		jumlah pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan	39 OPD	65.210.000	
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Malili	Jumlah obrik pencegahan dan pemberantasan korupsi	10 obrik	196.603.000		Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		Jumlah obrik pencegahan dan pemberantasan korupsi	10 obrik	58.120.000	

INSPEKTORAT	11.631.068.421	INSPEKTORAT	11.919.351.311
-------------	----------------	-------------	----------------

TABEL LAMPIRAN 3 (T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.749.684.635				8.378.061.970
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				94.917.736				95.589.475
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Malili	3 Dokumen	29.554.070	APBD		3 Dokumen	29.554.070
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Malili	2 Dokumen	12.981.195	APBD		2 Dokumen	14.279.314
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Malili	3 Dokumen	6.000.000	APBD		2 Dokumen	5.373.620
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Malili	10 Dokumen	46.382.471	APBD		10 Dokumen	46.382.471
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				6.035.582.331				6.794.607.374
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	Malili	45 Orang	6.023.769.931	APBD		45 Orang	6.791.027.606
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	Malili	18 Dokumen	11.812.400	APBD		18 Dokumen	3.579.768
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				665.251.823				683.932.376

	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Presentase kelengkapan data administrasi kepegawaian	Malili	95 Persen	6.821.694	APBD		95 Persen	6.821.694
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan tugas dan fungsi	Malili	53 Orang	520.611.059	APBD		53 Orang	534.041.612
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Malili	200 Orang	32.819.070	APBD		200 Orang	32.819.070
	Bimbingan tehnis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan tehnis implementasi peraturan perundang-undangan	Malili	10 Orang	105.000.000	APBD		10 Orang	110.250.000
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				629.348.300				579.348.300
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Malili	13 Unit	1.348.900	APBD		13 Unit	1.348.900
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Malili	4 Unit	71.806.500	APBD		2 Unit	21.806.500
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Malili	16 Jenis	3.908.700	APBD		16 Jenis	3.908.700
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan	Malili	1300 Lembar	10.000.000	APBD		1300 Lembar	10.000.000

	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Malili	60 Exemplar	6.180.000	APBD		60 Exemplar	6.180.000
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Malili	375 Orang	14.875.000	APBD		375 Orang	14.875.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Prov/luar prov	73 Kali	521.229.200	APBD		73 Kali	521.229.200
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					100.000.000				-
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Malili	1 Unit	100.000.000	APBD			-
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					134.084.445				134.084.445
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Malili	1300 Laporan	8.379.645	APBD		1300 Laporan	8.379.645
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon dan air yang terbayarkan	Malili	24 Rekening	50.704.800	APBD		24 Rekening	50.704.800
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan	Malili	5 Orang	75.000.000	APBD		5 Orang	75.000.000
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					90.500.000				90.500.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Malili	8 Unit	48.000.000	APBD		8 Unit	48.000.000

	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Malili	44 Unit	32.500.000	APBD		44 Unit	32.500.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Malili	1 Unit	10.000.000	APBD		1 Unit	10.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				3.109.869.684				2.795.695.157
	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL				2.482.414.494				2.378.695.157
	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Jumlah obrik pengawasan kinerja	Malili	39 OPD	256.164.630	APBD		39 OPD	242.000.000
	Pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah obrik pengawasan keuangan	Malili	56 OPD	833.602.715	APBD		56 OPD	1.013.245.276
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu laporan kinerja yang dilaksanakan	Malili	3 Kali	35.916.500	APBD		3 Kali	38.376.965
	reviu Laporan keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan yang dilaksanakan	Malili	6 Kali	78.976.575	APBD		6 Kali	82.191.156
	Pengawasan Desa	Jumlah pengawasan desa yang dilaksanakan	Desa	124 desa	297.935.424	APBD		124 desa	315.693.360
	Kerjasama Pengawasan internal	Presentase obrik pengawasan yang tersangkut kasus korupsi	Kab Luwu Timur	3 Persen	630.990.000	APBD		3 Persen	525.188.400
	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP internal dan eksternal	Kab Luwu Timur	88 Persen	348.828.650	APBD		88 Persen	162.000.000
		Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI		90 Persen				90 Persen	

	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU				627.455.190				417.000.000
	Penyelenggaraan pengawasan kerugian negara/Daerah	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	Kab Luwu Timur	12 Kasus	150.000.000	APBD		15 Kasus	175.000.000
	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	Kab Luwu Timur	45 Kali	477.455.190	APBD		25 Kali	242.000.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.059.796.992				822.094.560
	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.059.796.992				822.094.560
	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Jumlah pendampingan dan sistensi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Malili	62 Kali	936.466.992	APBD		62 Kali	591.734.760
	pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	jumlah pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan	Malili	39 OPD	65.210.000	APBD		39 OPD	14.096.500
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah obrik pencegahan dan pemberantasan korupsi	Malili	10 obrik	58.120.000	APBD		10 obrik	216.263.300
JUMLAH					11.919.351.311	JUMLAH			11.995.851.687

TABEL LAMPIRAN 4
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)			
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.749.684.635	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				94.917.736	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Malili	3 Dokumen	29.554.070	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Malili	2 Dokumen	12.981.195	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Malili	3 Dokumen	6.000.000	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Malili	10 Dokumen	46.382.471	APBD
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				6.035.582.331	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	Malili	45 Orang	6.023.769.931	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	Malili	18 Dokumen	11.812.400	APBD
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				665.251.823	
	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Presentase kelengkapan data administrasi kepegawaian	Malili	95 Persen	6.821.694	APBD
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan tugas dan fungsi	Malili	53 Orang	520.611.059	APBD
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Malili	200 Orang	32.819.070	APBD
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Malili	10 Orang	105.000.000	APBD
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				629.348.300	

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Malili	13 Unit	1.348.900	APBD
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Malili	4 Unit	71.806.500	APBD
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Malili	16 Jenis	3.908.700	APBD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan	Malili	1300 Lembar	10.000.000	APBD
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Malili	60 Exemplar	6.180.000	APBD
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Malili	375 Orang	14.875.000	APBD
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Prov/luar prov	73 Kali	521.229.200	APBD
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				100.000.000	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Malili	1 Unit	100.000.000	APBD
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				134.084.445	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Malili	1300 Laporan	8.379.645	APBD
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon dan air yang terbayarkan	Malili	24 Rekening	50.704.800	APBD
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan	Malili	5 Orang	75.000.000	APBD
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				90.500.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Malili	8 Unit	48.000.000	APBD
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Malili	44 Unit	32.500.000	APBD

	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Malili	1 Unit	10.000.000	APBD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				3.109.869.684	
	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL				2.482.414.494	
	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Jumlah obrik pengawasan kinerja	Malili	39 OPD	256.164.630	APBD
	Pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah obrik pengawasan keuangan	Malili	56 OPD	833.602.715	APBD
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu laporan kinerja yang dilaksanakan	Malili	3 Kali	35.916.500	APBD
	reviu Laporan keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan yang dilaksanakan	Malili	6 Kali	78.976.575	APBD
	Pengawasan Desa	Jumlah pengawasan desa yang dilaksanakan	Desa	124 desa	297.935.424	APBD
	Kerjasama Pengawasan internal	Presentase obrik pengawasan yang tersangkut kasus korupsi	Kab Luwu Timur	3 Persen	630.990.000	APBD
	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP internal dan eksternal	Kab Luwu Timur	88 Persen	348.828.650	APBD
		Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI		90 Persen		
	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU				627.455.190	
	Penyelenggaraan pengawasan kerugian negara/Daerah	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	Kab Luwu Timur	12 Kasus	150.000.000	APBD
	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	Kab Luwu Timur	45 Kali	477.455.190	APBD
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.059.796.992	
	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.059.796.992	
	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Jumlah pendampingan dan sistensi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Malili	62 Kali	936.466.992	APBD
	pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	jumlah pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan	Malili	39 OPD	65.210.000	APBD

	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah obrik pencegahan dan pemberantasan korupsi	Malili	10 obrik	58.120.000	APBD
JUMLAH					11.919.351.311	